

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

Sejarah perusahaan merujuk pada catatan dan perkembangan dari sebuah perusahaan sejak awal berdirinya hingga saat ini. Hal ini mencakup informasi mengenai pendirian perusahaan, perkembangan produk atau layanan, perubahan manajemen, pencapaian penting, tantangan yang dihadapi, serta perubahan dalam struktur organisasi dan strategi bisnis. Memahami sejarah perusahaan penting untuk mengetahui bagaimana perusahaan beradaptasi dan berkembang seiring waktu, serta untuk menilai dampaknya dalam industri atau pasar yang relevan.

Sejarah koperasi KPRI Saptawa berdiri sejak 18 Agustus 1967 dan diresmikan oleh Gubernur Lampung saat itu Hi. Zainal Abidin Pagar Alam. Tujuan didirikannya KPRI Saptawa agar dapat meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Setwilda Tingkat I Lampung pada tanggal 18 Agustus 1967. Kemudian, koperasi tersebut diberi nama Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur KDH TK. I Lampung dengan Badan Hukum Nomor: 29/B.H/VII-i/1968 tanggal 26 November 1968 yang kemudian diubah dengan Nomor: 29.a/BH/VII-i/1968 tanggal 18 November 1987.

Adapun Pengurus KPRI Saptawa saat itu adalah sebagai berikut :

1. Hi. Zainal Abidin Pagar Alam
2. Muchtar Hasan, SH.
3. Drs. Marwan Rusli
4. Ahmad Baginda, B.Sc.
5. Radja Sangun

Dengan adanya pengalihan jabatan, maka pada tahun 1981 Kepengurusan diketuai oleh Letkol Rudi Asa, dengan Wakil Ketua yaitu Hi. Adnan Zawawi.

Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 1984 seiring dengan perubahan Anggaran Dasar (AD) Gubernur Yasir Hadibroto pada tanggal 11 Juli 1985 mengubah nama Koperasi disingkat KPN SAPTAWA. Perubahan nama tersebut dengan akte dari Kanwil Departemen Koperasi Lampung No. 1083/KK VII/3.1/XII/1985 tanggal 15 Desember 1985.

Ditinjau dari nama KPN SAPTAWA mempunyai beberapa makna yang luhur yang berasal dari kata "SAPTA" yang berarti (tujuh) sedangkan "WA" mengandung tujuh macam program, antara lain:

#### 1. PROGRAM WAREG

Program Wareg adalah bahwa masalah pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan harus dikoordinir dengan baik agar semua anggota masyarakat cukup mendapat makan.

#### 2. PROGRAM WARAS

Sehat lahir dan batin yang berarti kesehatan lahir biasa didapat dari kesehatan anda, dimulai dari tempat tinggalnya, dari lingkungan RT, RW, sampai ke Desa. Selanjutnya memperhatikan kesehatan manusia dari tingkat balita, dewasa sampai lanjut usia. Sebab, Pemerintah Daerah itu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menyelenggarakan administrasi harus baik dan tertib dalam mengurus administrasi orang yang buta huruf sampai cendekiawan yang miskin sampai yang paling jutawan. Disamping itu kesehatan rohani artinya adalah pemantapan pendidikan agama dalam bidang kerohanian agar kehidupan beragama itu terutama digolongkan kecil dan untuk mempertinggi Ketaqwaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa

#### 3. PROGRAM WASIS

Yang berarti, anak-anak usia sekolah harus bersekolah, semua orang yang buta huruf harus masuk pemberantasan buta huruf sebab kita bertanggung jawab atas masalah memajukan kecerdasan bangsa.

#### 4. PROGRAM WISMA

Yang berarti, perumahan, supaya tidak lagi tuna wisma dan ini telah dirintis secara iuran, atau koperasi gotong-royong. Begitupun untuk menghadapi kesejahteraan perumahan dengan cara gotong-royong.

#### 5. PROGRAM WULU

Berarti sandang yang pada saat ini tidak menjadi masalah.

#### 6. PROGRAM WISESA

Kita harus mendirikan keterampilan kepada setiap orang dan mencari bekal untuk hidup sendiri. Harus kursus dan keterampilan diperluas, khusus Pemerintahan Daerah berkewajiban menunjang para tunakarya dan dapat memperoleh pekerjaan, dan pencarian yang mantap.

#### 7. PROGRAM WIBOWO

Kita harus mempunyai kepribadian, harga diri, dan mampu percaya akan diri sendiri guna memenuhi kebutuhan dan untuk kepentingan kita sendiri.

Pada RAT tahun buku 2022 tanggal 24 Mei 2023 disepakati pula merubah anggaran dasar KPRI SAPTAWA berdasarkan ketentuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran dasar disimpan di dalam data base sistem administrasi badan hukum. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR AHU-0001267.AH.01.38.TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Konsumen SAPTAWA Tanggal 05 Juni 2023.

Berdasarkan hasil RAT tahun buku 2022 tanggal 24 Mei 2023 terbentuklah Pengurus untuk masa bakti: 2023-2025 dan dikukuhkan oleh Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/410/V.15/HK/2023 tanggal 24 Juli 2020, maka susunan kepengurusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

#### I. PEMBINA: GUBERNUR LAMPUNG

## WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

### II. BADAN PENASEHAT

Ketua : Sekda Provinsi Lampung

Anggota :

1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

### III. BADAN PENGAWAS

Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.

Anggota :

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

### V. PENGURUS HARIAN

Ketua : Drs. Samsurijal, MM.

Wakil Ketua : Elvira Umihani SP,MT.

Sekretaris : Ir. Budi Muktiarsa Gani

Wakil Sekretaris : Syifa Aini, S.Sos., MM

Bendahara : Hj. Rusdiana Dewi, SE.

### 2.2. Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi menawarkan berbagai manfaat baik bagi anggotanya maupun bagi masyarakat secara umum. Berikut beberapa manfaat utama koperasi:

1. Pemberdayaan Ekonomi: Koperasi membantu anggotanya mendapatkan akses ke layanan keuangan, produk, dan layanan dengan harga yang lebih baik, meningkatkan daya beli dan mendukung usaha kecil.
2. Partisipasi Anggota: Setiap anggota koperasi memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, memberikan mereka kontrol lebih besar atas kegiatan koperasi.

3. Peningkatan Kesejahteraan: Koperasi seringkali berfokus pada kesejahteraan anggotanya, seperti melalui pembagian keuntungan (dividen) atau penyediaan layanan sosial.
4. Kolaborasi dan Solidaritas: Koperasi mendorong kerja sama antara anggotanya, membantu mereka untuk saling mendukung dan membangun komunitas yang lebih solid.

KPRI Saptawa adalah sebuah koperasi yang bertugas melayani anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan kerja Propinsi Lampung. Salah satu unit yang dikelola oleh koperasi ini adalah unit simpan pinjam, unit ini juga tidak mencari keuntungan semata-mata, tetapi menciptakan sumber kredit dari, oleh dan untuk anggotanya dan mengusahakan kesejahteraan bagi para anggotanya.

Gubernur Lampung saat itu (1967) Hi. Zainal Abidin Pagar Alam beserta beberapa pejabat lainnya mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1967. Untuk mendirikan koperasi dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekwilda Tingkat 1 Lampung.

### **2.3 Lokasi Perusahaan**

Lokasi KPRI Saptawa yang sangat strategis di perkotaan Bandar Lampung yang dekat dengan Kantor Gubernur, sehingga banyak masyarakat yang mengetahui perusahaan tersebut untuk mendapatkan keperluan dan kebutuhan tertentu. KPRI Saptawa beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.182, Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211. dengan perizinan sebagai berikut:

NIK : 1871050080002 tanggal 4 Agustus 2020

NIB : 0220309857345 tanggal 14 Agustus 2020

IMB : No. 648/00892/K/308/III.27.9/IX/2016 tanggal 6 September 2016

SIUP : No: 510.2.3/00183/30.2/III.27.2/VII/2013 tanggal 4 Juli 2018

NPWP : 01.278.358.5-324.000 tanggal 21 Mei 1987

Telp : 0721-484-202

E-mail : Koperasisaptawa@yahoo.com

Fax : 485459



## 2.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil RAT Tahun Buku 2022 tanggal 24 Mei 2023 terbentuklah Pengurus untuk masa bakti Periode 2023-2025 dan dikukuhkan oleh Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/410/V.15/HK/2023 tanggal 24 Juli 2020, maka susunan kepengurusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

### I. PEMBINA

1. GUBERNUR LAMPUNG
2. WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

### II. BADAN PENASEHAT

Ketua : Sekda Provinsi Lampung

Anggota :

1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

### III. BADAN PENGAWAS

Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.

Anggota :

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

#### IV. PENGURUS HARIAN

Ketua : Drs. Samsurijal, MM.

Wakil Ketua : Elvira Umihani SP,MT.

Sekretaris : Ir. Budi Muktiarsa Gani

Wakil Sekretaris : Syifa Aini, S.Sos., MM

Bendahara : Hj. Rusdiana Dewi, SE.